

SEKILAS PERILAKU MASYARAKAT ENTIKONG (PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA) DALAM MENGHADAPI BISNIS GLOBAL

Istiana Rahatmawati dan Purbudi Wahyuni
Program Studi Manajemen, FE, UPN "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK. 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Yogyakarta, 55283
Email: rahatmawati@yahoo.com

Abstract

Entikong sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang merupakan perbatasan fisik (darat) terpanjang di Indonesia dengan Negara lain, yang juga merupakan pintu gerbang terdepan keluar-masuknya barang dan jasa. Kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap wilayah ini, menyebabkan timpangnya kondisi yang ada antar dua Negara bertetangga. Didorong kesepakatan global terbukanya lintas batas perdagangan antar Negara, hal ini menyebabkan kondisi Indonesia semakin tertinggal jauh dengan Malaysia. Padahal jika segera dikelola dengan benar potensi yang ada di wilayah Entikong mempunyai banyak keunikan yang tidak kalah menariknya untuk bisa mendatangkan devisa Negara baik dari sektor hasil bumi (lada hitam, karet) maupun dari budaya (budaya masyarakat Dayak yang masih kental) serta keindahan alam (ekowisata baik berupa air terjun Pancur Aji, dan wisata hutan lainnya). Disamping itu mumpung masih adanya jiwa Merah Putih untuk mempertahankan NKRI, terbukti sebagian besar mereka masih bercita-cita menjadi Guru sebagai wujud kesadaran pentingnya kualitas generasi penerus bangsa yang saat ini masih sangat rendah (sebagian besar penduduknya belum lulus pendidikan Sembilan tahun) dalam menghadapi bisnis global. Temuan ini diharapkan bisa memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan untuk segera mengambil solusi.

Keyword: pintu gerbang terdepan, jiwa Merah Putih, ekowisata, NKRI.

A. Pendahuluan

Entikong sebuah nama yang semoga seluruh bangsa Indonesia tahu. Sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sebelum diperkenalkan konsep Negara modern (pasca perjanjian Westphalian 1648), negara tidak mengenal batas-batas fisik maupun batas-batas kultural. Baru setelah era kolonial Eropa Barat kedua Negara memiliki konsep-konsep

sebagai negara. Indonesia memproklamkan sebagai Negara merdeka pada 17 Agustus 1945 dan Malaysia pada 31 Agustus 1957. Konsekuensi adalah terciptanya garis demarkasi antara kedua Negara yang kemudian disebut sebagai perbatasan. Perbatasan dalam arti fisik kemudian tercipta di sepanjang pulau Kalimantan sejauh 2004 Km (yang merupakan perbatasan fisik (darat) terpanjang di Indonesia dengan Negara lain) dan perbatasan laut di sepanjang Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi (Madu *et al.*, 2010). Terlihat pada peta sebagai berikut:



Gambar 1: Peta Perbatasan Indonesia-Malaysia

Konsekuensi sebagai Negara modern yang memiliki batas-batas yang tegas dan memerlukan pengawasan, maka saat ini di ujung Kecamatan Entikong terdapat Pintu Masuk dan Keluar Negara yang merupakan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang diapit belahan kaki bukit “Benuan”. Pos ini merupakan pintu gerbang lintas batas utama antara Indonesia – Malaysia. Begitu kita melewati PPLB Entikong-Indonesia maka kita memasuki Gate (Pos Pemeriksaan) Tebedu – Serawak, Malaysia. Gate Tebedu dibuka jam 8 (delapan) pagi dan ditutup jam 5 (lima) sore. Melewati Gate ini berarti kita sudah berada di Tebedu, Serawak, Malaysia yang beribukotakan Kuching. Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu ini adalah yang paling sibuk dilalui barang maupun orang yang keluar masuk Indonesia–Malaysia. Menjelang jam 8 (delapan) pagi banyak warga Negara Indonesia yang menunggu pintu gerbang dibuka. Banyak diantara mereka adalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia yang pergi pulang tiap hari. Tentu saja mereka harus melewati pos sebelum jam 5 (lima) sore. Kalau melebihi jam tersebut, pos sudah ditutup maka akan panjang urusannya, apalagi kalau paspor maupun dokumen persyaratan kerja tidak ada. Walaupun sampai saat ini masih ada kerukunan antara masyarakat Entikong (Kalbar, Indonesia) dengan masyarakat Tebedu (Serawak, Malaysia). Terbukti bahwa sudah menjadi tradisi setiap ada pesta (dawai) Serawak masyarakat Entikong diizinkan masuk ke Serawak secara bebas menikmati kemeriahan pesta rakyat Serawak, demikian pula pada saat dawai Dayak, masyarakat Serawak diizinkan bebas masuk ke Entikong. Tradisi ini terpelihara karena sebagian masyarakat Entikong dan masyarakat Serawak masih memiliki hubungan darah dan menjadi saudara karena perkawinan.

Kalau dari Indonesia arus manusia yang masuk ke Malaysia, namun sebaliknya yang masuk ke wilayah Indonesia adalah barang-barang terutama kebutuhan pokok baik

berupa sembilan bahan pokok. Sudah jadi rahasia umum bahwa Entikong merupakan pintu masuk barang-barang Malaysia ke Indonesia terlepas legal maupun illegal. Perjanjian perdagangan perbatasan antara Indonesia-Malaysia 1970, memuat ketentuan bahwa masyarakat perbatasan dengan menggunakan kartu lintas batas mendapatkan prioritas belanja murah di Malaysia senilai RM 600 per bulan per orang. Namun sering kartu belanja, dikumpulkan secara kolektif, selanjutnya pesanan berupa pasokan Sembako berupa Gula, beras, minyak goreng dan lain-lain kebutuhan sehari-hari diangkut *truck* dikirim ke Agen-agen besar dari Malaysia ke wilayah perbatasan Indonesia. Pada sisi lain Mobil Box pedagang Malaysia selalu siap mengantar barang yang dibeli oleh orang Indonesia yang belanja di Malaysia dan diantarkan sampai ke rumah atau warung kecil mereka. Demikian juga halnya untuk kebutuhan alat pertanian (input produksi) dan sarana produksi didatangkan dari Serawak, yang masih berupa alat-alat produksi tradisional (cangkul, parang, sabit, dan lain sebagainya). Malaysia seolah-olah terus berusaha memanjakan warga Indonesia yang menghendaki barang-barang tersebut.

Wilayah Entikong berada dalam wilayah Indonesia yang berhadapan langsung dengan Negara Asing (Malaysia), sudah selayaknya didisain ibarat etalase yang menjadi representasi wajah Indonesia yang dapat dibanggakan. Namun pada kenyataan kondisinya sangat jauh dari harapan. Prihatin kalau melihat Entikong sebagai garis terdepan Indonesia yang dilihat dunia terutama negara tetangga justru terbelakang tak diperhatikan oleh para pemegang kekuasaan di negeri ini. Demikian jelasnya perbandingan yang mencolok antara kondisi yang ada di wilayah Indonesia dengan yang ada di wilayah Malaysia. Begitu masuk wilayah Malaysia, jalanan lengang; bersih, aspalnya mulus, tidak ada sepeda motor menderu-deru, tidak ada pengendara sepeda motor tanpa helm; peraturan kecepatan

kendaraan tidak lebih dari 40 km/jam; tidak boleh mendahului kendaraan lain; tidak ada yang merokok sambil mengemudi apalagi sambil tilpun atau SMS, pengemudi mobil dapat dipastikan dengan sabuk pengaman terpasang. Tidak sampai 10 menit berkendara mobil, kita akan sampai pada sebuah toko swalayan besar SIN GHUAN THAI BHD yang menjual berbagai jenis barang Malaysia dari sembako, buah, bumbu instan, peralatan dapur, perlengkapan mandi, makanan ringan, minuman, peralatan tulis, elektronik, pakaian, tas, sepatu, sandal, souvenir, perabot rumah dan lain sebagainya, semua tersedia dengan harga dalam Ringgit yang menantang. Misalnya *Ice Cream Magnum Classic* RM 4 atau Rp 12.000,- (di Jogja Rp 10.000,-) Naik turun harga tergantung nilai tukar Rupiah terhadap Ringgit. Kalau dibandingkan dengan harga-harga di Jogja sebetulnya tidak lebih murah. Tapi lain halnya kalau dibandingkan dengan harga yang berlaku di wilayah perbatasan. Sebagai perbandingan misal harga Bensin Premium eceran di Jogja Rp 5.000,- Entikong Rp 7.500 bahkan sampai Rp 8000,- per liter. Harga bensin tentu berimbas pada harga barang-barang lain. Oleh karena letak yang strategis dan menawarkan semua kebutuhan konsumen, maka Swalayan ini sangat ramai pengunjung. Pembeli terbanyak tentu saja dari Indonesia, baik penduduk perbatasan maupun wisatawan nusantara yang ingin merasai melewati *Gate Tebedu – Entikong*. Dari Tebedu masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) apa yang kita lihat adalah pemandangan yang sangat kontras dari sarana fisik maupun pada nuansa bisnis.

Kondisi tersebut perlu kita ketahui bersama, untuk selanjutnya informasi ini dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah yang sampai saat ini masih lambat menyikapi permasalahan-permasalahan perbatasan yang ada. Apalagi dalam era global dengan telah adanya kesepakatan *Border Trade Agreement* yang kurang jelas dan

adanya *Free Trade Agreement* (FTA) dimana produk-produk asing dengan mudah masuk ke Indonesia, menyebabkan munculnya ketimpangan dagang dan semakin tergesurnya industri Indonesia dari percaturan perdagangan khususnya dengan Malaysia. Untuk itu diperlukan terobosan yang memangkas hambatan birokrasi dalam upaya pengambilan solusi yang efektif.

B. Entikong Etalase Indonesia

Entikong berada dalam wilayah Indonesia yang berhadapan langsung dengan Negara Asing sudah selayaknya didisain ibarat etalase yang menjadi representasi wajah Indonesia yang dapat dibanggakan. Namun pada kenyataan kondisinya sangat jauh dari harapan. Prihatin kalau melihat Entikong sebagai garis terdepan Indonesia yang dilihat dunia terutama negara tetangga justru terbelakang tak terperhatikan oleh para pemegang kekuasaan di negeri ini.

Perbandingan yang sangat mencolok melihat kondisi yang ada di wilayah Indonesia dibandingkan dengan kondisi yang ada di wilayah Malaysia. Begitu masuk wilayah Malaysia, jalanan lengang; bersih, aspalnya mulus, tidak ada sepeda motor menderu-deru, tidak ada pengendara sepeda motor tanpa helm; peraturan kecepatan kendaraan tidak lebih dari 40 km/jam; tidak boleh mendahului kendaraan lain; tidak ada yang merokok sambil mengemudi apalagi sambil tilpun atau SMS, pengendara mobil dapat dipastikan dengan sabuk pengaman terpasang. Fasilitas pendidikan mulai Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi telah tersedia dengan optimal. Semua itu mudah dilihat

Pemandangan dan kenyataan tersebut, hanya sekitar 10 menit berkendara mobil, kita akan sampai pada sebuah toko swalayan besar SIN GHUAN THAI BHD yang menjual berbagai jenis barang Malaysia dari sembako, buah, bumbu instan, peralatan dapur, perlengkapan mandi, makanan ringan, minuman, peralatan tulis, elektronik, pakaian, tas, sepatu, sandal, souvenir, perabot rumah dll.. Oleh karena letak yang strategis dan menawarkan semua kebutuhan konsumen, maka Swalayan ini sangat ramai pengunjung. Pembeli terbanyak tentu saja dari Indonesia, baik penduduk perbatasan maupun wisatawan nusantara yang ingin merasai melewati *Gate* Tebedu – Entikong. Dari Tebedu Masuk ke dalam wilayah NKRI apa yang kita lihat? Banyak mobil angkutan Indonesia mangkal di pinggir jalan karena konon katanya mobil angkutan Indonesia tidak boleh beroperasi keluar masuk perbatasan, tapi tidak demikian halnya dengan mobil-mobil angkutan Malaysia yang banyak saya lihat di wilayah Indonesia.



Gambar 2 : Kondisi Terminal Bus Utama di Entikong

Suasana khas daerah pinggiran tertangkap dengan jajaran warung dan toko toko kelontong tradisional usaha kecil masyarakat setempat. Semakin masuk ke Entikong, jalan semakin tidak mulus dan pengendara pengguna jalanpun terkesan kurang memperhatikan Undang Undang Lalu Lintas. Jangan berharap ada *Mall* atau Gedung indah megah disana. Hanya ada beberapa bangunan baru kantor kantor pemerintah yang agak modern misalnya Kantor Imigrasi dan Kantor Pajak. Tidak ada Rumah Sakit, yang ada hanya Puskesmas yang buka 24 jam dengan segala keterbatasannya yang beberapa tahun silam tenggelam banjir luapan sungai disampingnya, sampai tinggal tampak punggung gentengnya saja. Pasar tradisional yang becek yang ramai pengunjung tiap pagi hingga siang hari. Barang dagangan

buah dan sayuran banyak kiriman dari ladang hutan yang bersaing dengan buah dan sayur impor yang dikirim lewat Surabaya. Sekolah Dasar (SD) pun sederhana, sejak ada dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) mulai ada tambahan biaya untuk peningkatan sarana mengajar. Sebelumnya Entikong tidak mengenal computer karena baru mulai tahun 2010, dana BOS diperbolehkan untuk membeli komputer dan sambung internet, namun tidak bisa dioperasikan karena tidak ada sinyal. SD berjumlah empat tersebar dalam wilayah kecamatan. Siswanya banyak yang tidak punya sepatu. Seragam lusuh, makan nasi sayur rata-rata dua kali se hari. Demikian pula Sekolah Menengah Pertama yang hanya ada dua dan sebuah Sekolah Menengah Atas yang agak representatif milik Swasta. Rumah rumah penduduk mayoritas rumah kayu semi permanen. Khusus di Dusun Sontas rumah tinggal penduduk sudah “modern” model blok blok ala perumahan sederhana karena memang dibuat oleh pemerintah pada tahun 1970an untuk memindahkan 70 KK penduduk di wilayah terpencil di hutan atau suku terasing. Itupun keadaannya masih sangat terbatas, sangat jauh beda dengan kondisi wilayah tetangganya yaitu Tebedu (Malaysia). Adapun salah satu jalan masuk perumahan di Dusun Sontas Desa Entikong, seperti terlihat pada gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3: Wilayah Dusun Sontas

C. Topografi Kecamatan Entikong

Topografi Kecamatan Entikong bervariasi dengan dominasi bentuk permukaan daratan bergelombang, perbukitan rendah sampai pegunungan yang meliputi 90% dari luas wilayahnya, sehingga jenis pekerjaan penduduknya didominasi oleh lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian. Hampir semua bertani di ladang dan hutan. Fisik lingkungan yang berupa deretan pegunungan, secara geografis terletak membujur Timur-Barat sepanjang garis perbatasan Negara. Jangan membayangkan garis batas Negara ini lurus, karena kenyataannya garis batas Negara ini berliku-liku, naik turun perbukitan bahkan melintasi sungai dan tanda batasnya hanya Patok, yang kurang lebih satu meter tingginya.

Dimaklumi jika para petani ladang di perbatasan Malaysia maupun Indonesia sering saling melampaui batas-batas ini. Hanya dengan saling meminta ijin terlebih dahulu kegiatan bertani mereka “aman”. Jarak rumah tempat tinggal dengan lahan garapan paling dekat ditempuh dalam waktu 2 jam dengan sepeda motor (lahan terdekat). Bagi masyarakat yang memiliki lahan garapan jauh dari rumah yaitu berada di hutan akan butuh waktu lebih lama, sehingga harus menginap di hutan beberapa hari bersama petani yang lain dengan membawa bekal dimasak. Anak-anak ditinggal di rumah dititipkan kepada sanak keluarga. Jenis tanaman yang sebagian besar ditanam berupa sawah atau lada (hitam) dengan pertimbangan bahwa lada hitam ini mempunyai nilai jual lebih tinggi dibandingkan lada putih.

Dengan kondisi sekolah yang berada jauh dari pemukiman warga, hal ini yang mendorong para generasi penerus bangsa tidak mengenyam pendidikan cukup (biarpun hanya pendidikan dasar 9 tahun). Terbukti jumlah penduduk sebanyak 6.587 orang yang terdiri atas 3.458 pria dan sejumlah 3.129 wanita atau sebanyak 1.445 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut yang tidak tamat SD ada 1.070 orang, lulus SD ada sejumlah 1.418 orang, tamat SLTP sejumlah 1.396 orang, yang lulus SLTA ada sejumlah 268 orang, dan yang lulus diploma ada sejumlah 14 orang, yang mampu lulus Stata 1 (S1) ada sejumlah 25 orang dan yang mampu menyelesaikan studi S2 ada sebanyak 4 orang. Dan perlu diketahui bahwa masyarakat yang telah mengenyam pendidikan sekurang-kurangnya SLTA mereka banyak yang bekerja di Malaysia (BPS Maret 2012).

Pada bidang pertanian, mengingat garis batas Negara yang berliku dan sulit untuk dibuat batas areal garapan, maka warga ke dua Negara ini bekerja di ladang yang saling menerjang batas wilayah, saling masuk wilayah ke dua Negara. Selama ini keadaan ini terjadi dengan damai. Para petani Malaysia ini boleh dibilang sangat santun, dan mereka

tidak berani menyentuh lahan di wilayah Indonesia sebelum mendapat ijin dan janji hanya sekedar cari nafkah saja, tidak lebih. Masyarakat Negara tetangga takut terutama pada Tentara Indonesia. Cerita yang berkembang disana bahwa julukan tentara Indonesia sebagai tentara siluman yaitu “Hantu di malam hari dan Macan di siang hari”. Yang membuat ngeri mereka bahwa ada bukti nyata bahwa tentara Inggris dulu terpukul mundur dan banyak korban yang tewas terpenggal di hutan. Bahkan sampai sekarangpun mereka percaya satu tentara Indon (Indonesia jadi Indon di wilayah Malaysia ini) lawan 10 tentara Malaysia tetap menang tentara Indonesia.

Kesantunan mereka juga terlihat dari rasa kemanusiaannya terhadap warga Indonesia, apalagi dengan sesama guru. Seperti yang dialami oleh Pak Paimin Kepala Sekolah yang pada tahun 1976 dulu dikirim Pemerintah untuk menjadi Guru SD di Entikong banyak menceritakan pengalaman sejak dahulu pertama kali datang sampai kegiatannya sekarang. Ada yang sangat menarik yakni ketika pertama kali datang ditanya seseorang “Bawa salin tidak?” Di jawab “Bawa”, maka sejak itu beliau menderita penyakit aneh setengah mati. Dalam satu tahun hanya sehat empat bulan, selebihnya terkapar sakit terus sampai akhirnya ada yang menyembuhkan dan memberinya “salin” yang ternyata adalah baju/ pelindung serangan yang tak nampak. Banyak cerita legenda yang percaya tidak percaya, ada disana. Kekuatan ilmu gaib Dayak sangat ditakuti. Jadi setidaknya “ketakutan” pada kekuatan TNI dan pada kekuatan gaib sudah merupakan *deterrence power* atau daya gertak yang mengerikan bagi warga Malaysia.

Akan tetapi bentuk ancaman yang ada justru lebih mengkhawatirkan karena daya pikat yang lembut yang saya gambarkan seperti sikap manisnya kucing bila ada tuannya, tetapi gesit menerkam ketika tuannya lengah. Perlakuan Malaysia sangat manis terhadap

warga Indonesia di perbatasan. Sebagai misal yang terjadi di Indonesia, ketika sakit apalagi harus operasi, pelayanan kesehatan kita sangat jauh dari memuaskan. Tuntutan kelengkapan administrasi sering menyebabkan hilangnya tanggap darurat. Sedangkan bila mereka warga perbatasan ini menyeberang ke Rumah Sakit di Malaysia, mereka datang langsung ditangani. Bahkan untuk pasien yang dari Indonesia lebih didahulukan daripada warga Malaysia sendiri. Ini cerita pak Paimin ketika anaknya sakit. Sebagai kepala SD beliau dipanggil sebagai kepala guru besar. Beliau tilpun ke teman sesama guru di Malaysia untuk membantu proses masuk Malaysia dan masuk Rumah Sakit di Kuching Sarawak. Dengan menyewa mobil membawa anaknya bebas masuk Malaysia dan langsung menuju Rumah Sakit. Hanya ditanya secara singkat: nama, alamat, bawa uang berapa? Uangnya hanya 100 RM, oleh petugas hanya diminta 50RM saja untuk administrasi. Si anak langsung diperiksa laboratorium lalu ditangani operasi oleh lima dokter spesialis. Semua gratis. Ketika menunggu pasien harus menginap, pak Paimin yang asli Jogja ini tidak punya saudara disana dan tidak mampu membayar hotel, maka pihak rumah sakitpun menyediakan akomodasi dan konsumsi secara cuma cuma sampai anaknya (pasien) boleh keluar dari rumah sakit, pulang.

Dalam hal pendidikan, di Malaysia sekolah gratis, fasilitas modern, Anak-anak TK sudah kenal laptop, Anak-anak SD sudah menggunakan komputer, gaji guru sangat menggiurkan sangat jauh dari yang diterima guru di Entikong . Di Entikong, sekolah berarti mengeluarkan dana, fasilitas minim. SDN3 Sontas baru dapat satu unit komputer dan internet pada tahun 2010 tapi tidak dapat dioperasikan karena tidak ada jaringan. Melihat tetangga sebelah yang diperlakukan lebih pancasilais daripada yang mereka rasakan dibumi Pancasila inilah yang dikhawatirkan justru mereka jadi lebih memilih menjadi warga Negara Malaysia. Seharusnya kita belajar dari lepasnya Sipadan dan Ligitan yang warganya dibuai

dinikmati dengan nilai-nilai kemanusiaan sehingga acuh saja ketika berubah kewargaan Negara sebagai buah acuhnya pemerintah pusat terhadapnya dan ketidak mampuan mempertahankan keutuhan wilayah Inonesia. Mengingat itu semua bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap warga yang tinggal di wilayah perbatasan. Indikasi ini sudah Nampak yakni adanya 61 jiwa (dari tahun 1980 – 2011) warga desa Suruh Tembawang yang berpindah menjadi Warga Negara Malaysia kata pak Imran Manuk sang kepala desa. Meski pengurusan KTP dan KK telah digratiskan oleh Gubernur Kalbar Pak Cornelis. Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjungpura Mayor Jenderal Geerhan Lantara membenarkan bahwa mereka mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan dan minimnya pelayanan kesehatan dan pendidikan.

D. Potensi Wilayah Entikong

Dalam ketidakberdayaan warga negara kita di perbatasan memandang lampu yang terang benderang, jalan mulus menyilaukan, gegap gempita riang anak-anak di Negara tetangga yang sekolah benar benar gratis dengan fasilitas serba modern dan Pelayanan kesehatan yang prima. Sementara di Entikong, di bumi pertiwi tercinta semua serba sederhana kalau tidak boleh dibilang terbelakang. Tekanan kebutuhan untuk hidup yang mendesak, infra struktur tidak memadai, sembilan bahan pokok langka apalagi kebutuhan yang lainnya. Hidup di perbatasan meski dalam keterbatasan tidak berarti melunturkan semangat hidup dan bela Negara. Rata-rata anak-anak sekolah bercita-cita menjadi guru bukannya ingin kaya dan hidup enak. Ketika ditanya mengapa ingin jadi guru jawab mereka “ Kami ingin pintar dan bisa membuat pintar”. Ada juga yang menjawab bahwa “Semua kemajuan dibuat oleh orang pintar”.

Namun tidak dipungkiri, bahwa perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi di daerah perbatasan Kalimantan membuat kasus-kasus *trafficking*. Penduduk Kalimantan Barat banyak tergiur menjadi tenaga kerja di Serawak, bahkan dengan status tenaga kerja illegal sekalipun. Kalimantan Barat menempati urutan terbesar dalam kasus *trafficking*, bersama-sama dengan Batam. Orientasi penduduk yang lebih besar pada Negara tetangga. Terutama sekali karena jarak ibukota yang jauh yaitu 432 km (atau sejauh Yogyakarta- Bandung). Sedangkan untuk sampai di Tebedu hanya tinggal lompat “pagar” Gate Tebedu, dan untuk ke kota Serian, Serawak hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit, warga sudah dapat menikmati fasilitas masyarakat yang serba modern .

Atas dasar hal tersebut, suplai barang-barang lebih didominasi dari Serawak. Barang – barang lebih mudah diperoleh dan lebih murah. Gula putih Malaysia misalnya, bisa dibeli dengan harga Rp 8500,- karena mendapatkan subsidi dari Kerajaan Malaysia Rp 1.500,-, sedangkan gula putih yang didatangkan dari Jawa harganya Rp 13.000,- .. Hijrahnya ratusan pedagang ke Serawak juga membuktikan perekonomian di daerah perbatasan sangat tergantung pada Serawak. Kegiatan perdagangan ke Serawak ternyata memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi negara tetangga tersebut. Bahkan menjadi hal yang lazim bagi penduduk Indonesia di daerah perbatasan menggunakan mata uang ganda yaitu menggunakan Ringgit Malaysia (RM) dan mata uang Rupiah Indonesia.

Di sektor kehutanan, produksi kayu Serawak sebenarnya mereka mendapatkan kayu-kayu dari Kalimantan Barat, tetapi telah menjadikan Negara Malaysia Timur menjadi salah satu daerah penghasil devisa terbesar ke dua setelah minyak dan gas. (Wahyuni, 2005). Kasus-kasus *illegal logging* terjadi karena kondisi infra struktur yang lebih baik di wilayah

Serawak, dimana dimungkinkan mereka dapat mengakses hutan-hutan perbatasan dari wilayah Serawak dan segera pergi ketika terjadi razia.

Kondisi pembangunan yang lebih maju dan fasilitas umum yang lebih lengkap di Serawak membuat penduduk lebih sering dan lebih mudah memanfaatkan fasilitas hidup di Serawak. Penduduk Kalimantan Barat lebih mudah memanfaatkan sarana Jalan; Pasar; Rumah Sakit dan Sekolah di Serawak dibandingkan jika mereka harus pergi ke Pontianak.

Melihat kasus-kasus di atas, kondisi dan persepsi masing-masing stake holder menjadi penting. Bagaimana pemerintah kita memperlakukan kawasan perbatasan, bagaimana pula Negara tetangga menanggapi/memandang pentingnya daerah perbatasan dan juga sejauh mana penduduk memahami dan memperlakukan daerah perbatasan dikaitkan dengan kebutuhan mereka sendiri. Kekecewaan dan ketidakpuasan penduduk daerah perbatasan, dan atau peluang besar dalam bisnis serta potensi melimpah yang menggiurkan Negara tetangga mungkin saja menimbulkan adanya proses okupasi/pendudukan, anektasi, akresi, preskripsi, session penentuan nasib sendiri serta secessionist dan irredentists terbuka lebar.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan secara kualitatif dilakukan melalui metode *indepth-interview* (wawancara) dan *focus group discussion* dan untuk memperoleh masukan lebih terperinci mengenai perilaku masyarakat perbatasan Entikong, dengan para tokoh masyarakat setempat yaitu Kelapa Dusun (Kadus), Kepala

Sekolah dan Guru-Guru Sekolah Dasar (SDN 3 Sontas, Enthikong), Ketua Pemuda, Ibu-Ibu PKK, dan Tokoh Informal.

F. Pembahasan

Berbagai studi menunjukkan bahwa isue tentang perbatasan sangat kompleks. Secara umum permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah ini dapat diidentifikasi berdasar beberapa kelompok *issue*, (Depkimpraswil, 2002; BAPPENAS 2004; LEMHANNAS, 2004; dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yaitu menyatakan sebagai berikut:

1. Isu geografis-teritorial karena belum disepakatinya batas-batas wilayah darat maupun laut di beberapa tapal batas dengan Negara tetangga.
2. Isu-isu keamanan dan kedaulatan nasional, terutama kejahatan lintas batas (*cross border crimes*) yang terorganisir seperti penyelundupan, perdagangan illegal (obat, manusia, bahan2 makanan, kayu dll) dan garis batas (*dispute area*) yang kabur dengan akibat berkurangnya wilayah nasional Indonesia.
3. Isu lingkungan yakni kerusakan ekologi dan eksploitasi sumberdaya berlebihan, bersifat lintas batas dan dilakukan secara legal maupun illegal (mis: *illegal logging*). Potensi SDA yg melimpah blm mampu memberikan nilai tambah yang besar dan pusat pelestarian lingkungan belum berkembang.
4. Isu kemiskinan, keterbelakangan, keterbatasan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dialami WNI di perbatasan membuat terjadinya perdagangan manusia. Sarana transportasi dan pembangunan yang masih minim, infrastruktur yang terbatas.

5. Isu koordinasi dan implementasi kebijakan pembangunan akibat jauhnya jarak komunikasi antara pemerintah lokal dan pemerintah daerah/pusat. Rendahnya alokasi dana pembangunan/ ketergantungan pada pemerintah pusat dan belum terwujudnya keterpaduan dalam upaya pengelolaan perbatasan. Pembangunan hanya diarahkan pada pusat-pusat kota/pertumbuhan. Masih minimnya pelayanan CIQS pada pintu-pintu lintas batas.
6. Isu kependudukan dan perubahan sosial terutama akibat migrasi lintas batas yg bersifat legal dan illegal.
7. Isu patriotism dan ketahanan nasional terutama menyangkut persepsi penduduk perbatasan bahwa mereka di”anak tiri”kan.

Dari ke tujuh *issue* yang ada, isu kemiskinan dan isu rendahnya komunikasi dengan pemerintah pusat, menjadi lahan empuk bagi wilayah tetangga untuk memanfaatkan semua kemungkinan peluang. Tendensi kerelaan untuk mengantarkan barang sampai ke rumah-rumah, ada indikasi. Memecah komunikasi, menghambat informasi langsung. Sebagai contoh sambil menghantarkan barang ke warga, balik ke Malaysia mereka bisa membeli hewan babi hidup dinilai per kg Rp 30.000,- sedangkan di Malaysia daging babi dijual seharga tiga kali lipat. Demikian juga untuk pembelian hasil bumi dari ladang garapan warga perbatasan.

Dengan memecah komunikasi antar warga, setiap penduduk akan dengan suka rela menjual hasil panennya (misalnya lada ke para tengkulak Serawak). Bahkan yang lebih mengesankan adanya oknum masyarakat setempat yang juga memanfaatkan kartu belanja gratis senilai RM 600, dipinjam dengan iming-iming tertentu, antara lain ditukar dengan uang senilai Rp 100.000,-. Selanjutnya kartu belanja bisa dipergunakan untuk memborong barang-

barang kebutuhan pokok yang akhirnya dijual kembali ke warga perbatasan di wilayah Indonesia dengan harga yang lebih tinggi. Masyarakat Entikong dengan rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya(informasi) pengetahuan, tidak ada pilihan lain, hal tersebut di atas dianggap tidak merugikan, seperti ungkapan pak Edi, salah satu warga “saat ini aku belum butuh sembako, aku perlu uang, ya aku tukar dengan uang, diam di rumah dapat uang!”.

Padahal seharusnya hal yang demikian tidak terjadi, jika Negara benar-benar mengamalkan Pasal 33 UUD ‘45 memberikan ketentuan-ketentuan imperative bagi Negara untuk mengatur perekonomian. Ayat 1, menyatakan, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Perkataannya adalah “perekonomian disusun” tentu artinya tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan adalah “usaha bersama” artinya berdasar suatu *mutualisme* yang menunjukkan perbedaannya dari usaha swasta yang didorong oleh *self-interest*. Sedang “azas kekeluargaan” artinya adalah *brotherhood* yang bukan *kinship nepotistic*, sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama layaknya makna *brotherhood*.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas terhadap kegiatan sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sehingga tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih baik. Tatanan kehidupan perekonomian yang saat ini telah mengacu pada perdagangan bebas, perlu segera ada perhatian serius dari pusat dan daerah untuk segera mengejar ketertinggalan jika tidak ingin wilayah NKRI menjadi pasar bagi produk asing di era global.

Banyak potensi wisata yang dimiliki oleh masyarakat Dayak dengan segala keunikannya, jika potensi ini dikelola dengan benar, maka akan dapat menjadi kekuatan riil

sektor pariwisata. Dengan adanya obyek wisata yang unik misalnya Wisata Hutan, Out bond, Wisata Air, Kebun Buah, Kebun Binatang ini akan bisa semakin menarik orang Serawak “datang” kembali ke Entikong. Mengingat dulu Entikong pernah terkenal dengan “*Sunday Market*”nya sebelum *Sunday market* didirikan di kota Bau. Kalau saat ini Warga perbatasan Indonesia pergi ber”wisata” dan mengalirkan hasil buminya dari Indonesia ke Serawak, maka sangat dimungkinkan kelak akan terjadi yang sebaliknya, warga Malaysia yang datang ber”wisata” dan berbelanja di wilayah perbatasan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Balai Pusat Statistik, 2012, tribunpontianak.co.id
- BNPP.go.id
- Effendi, Irhas; Purbudi W, Dyah Sugandini. 2009. Evaluasi KEefektifan Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MD) Perdesaan Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Bantul DIY. Proses publikasi.
- Google, Era baru News
- Kartikasari, wahyu. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isue dan Permasalahan Perbatasan: Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah-wilayah Perbatasan Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- , 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isue dan Permasalahan Perbatasan: Trafficking di Wilayah Perbatasan KalBar-Serawak*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sutisna, Sobar dan Widodo, Kusumo. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isue dan Permasalahan Perbatasan*: Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Swasono, Sri Edi. 2011. Menolak Neoliberalisme: Kembali Ke Ekonomi Konstitusi. Seminar Nasional Kebijakan Ekonomi Pancasila.
- Warsito, Tulus. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isue dan Permasalahan Perbatasan: Perbatasan Kalbar- Serawak Dlm Perspektif Buruh Migran Ind*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

